

Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Pendidikan Dasar (Studi pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)

Mariamah¹, I Nengah Suastika²

¹STKIP Taman Siswa Bima

²Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha

Article Info

Article history:

Accepted: 16 Desember 2021

Publish: 02 Januari 2022

Keywords:

BUMDes

Kesejahteraan

Pendidikan Dasar

Article Info

Article history:

Diterima: 16 Desember 2021

Terbit: 02 Januari 2022

BUMDes

Well-being

basic education

Corresponding Author:

Mariamah

STKIP Taman Siswa Bima

Email: mariamahmariamah85@yahoo.co.id

ABSTRAK

BUMDes dibentuk tidak hanya berperan dalam usaha perekonomian melainkan juga berusaha dalam bidang pendidikan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan Masyarakat desa. Usaha milik desa yang bergerak dalam bidang pendidikan tidak kalah pentingnya seperti usaha-usaha bidang lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dasar dan untuk mengetahui Bidang usaha lain apa saja yang dijalankan BUMDes yang ada di kecamatan Palibelo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa instrument wawancara. Analisis data dimulai dari data reduction, data display dan *conclusion drawing verification*. Data juga dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan kebanyakan usaha dibidang bisnis keuangan (koperasi) dengan persentase 77%, lalu yang ke dua dengan persentase sebesar 15% dibidang usaha perdagangan. Yang ke tiga adalah bidang pertanian dan peternakan dengan persentase 8%. Untuk usaha dalam bidang pendidikan dengan persentase 0%. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.

Abstract

BUMDes was formed not only to play a role in economic efforts but also to work in the field of education as an effort to fulfill the needs and welfare of rural communities. Village-owned businesses engaged in education are no less important than businesses in other fields. The purpose of this study was to determine the role of BUMDes in improving the welfare of the community in the field of basic education and to find out what other business fields were carried out by BUMDes in Palibelo sub-district. This type of research is a qualitative descriptive research. The instrument used in collecting data is an interview instrument. Data analysis starts from data reduction, data display and closure drawing verification. The data were also analyzed using the percentage formula. The results showed that most of the businesses run in the financial business (cooperatives) with a percentage of 77%, then the second with a percentage of 15% in the trading business. The third is agriculture and animal husbandry with a percentage of 8%. For businesses in the field of education with a percentage of 0%. It can be concluded that BUMDes has no role in the field of education, including basic education.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa setempat. Pendirian BUMDes ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 terkait pemerintah desa. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap desa dapat mendirikan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dalam rangka untuk mewartakan perekonomian dan aktifitas Masyarakatnya. [1] menyatakan bahwa keberadaan BUMDes ini dirasa sangat penting sehingga dalam pendiriannya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat urgen dalam mensejahterakan masyarakat desa. Adapun tujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa, 2) meningkatkan pemanfaatan potensi desa sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat, dan 3) sebagai tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemenuhan distribusi barang maupun jasa. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, hal yang paling diperhatikan adalah tidak memberatkan masyarakat karena BUMDes itu sendiri akan menjadi usaha milik desa yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian desa. Dengan adanya tujuan dari BUMDes di atas, maka BUMDes tidak hanya berperan dalam usaha perekonomian melainkan juga berusaha dalam bidang pendidikan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan Masyarakat desa. Usaha milik desa yang bergerak dalam bidang pendidikan tidak kalah pentingnya seperti usaha-usaha bidang lainnya. Sebab usaha bidang pendidikan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat seperti adanya fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai salah satu upaya pembinaan untuk anak-anak usia dini, dengan tujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan terhadap anak-anak sebelum masuk usia sekolah.

Dalam hasil penelitian [2] diperoleh informasi bahwa dari 26 desa yang disurvei, hanya terdapat tiga desa yang mendirikan dan mengembangkan Badan usaha milik desa. Untuk 23 desa lainnya belum mendirikan BUMDes. Dari tiga desa (12%) yang memiliki dan mengembangkan BUMDes ini sudah menyediakan PAUD sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa di bidang pendidikan. Alasan ke 3 desa tersebut sehingga mengalokasikan dana desa untuk pengelolaan PAUD karena PAUD yang ada masih memerlukan fasilitas yang dibutuhkan sehingga PAUD yang ada memiliki fasilitas yang cukup. Sedangkan 88% desa lainnya (23 desa) belum mengalokasikan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan PAUD dengan alasan bahwa PAUD yang sudah ada sudah cukup berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas yang memadai, selain itu juga, tidak semua desa memiliki PAUD sehingga tidak perlu ada anggaran yang perlu dialokasikan

[3] menyatakan bahwa BUMDes yang sudah terbentuk, secara umum belum menunjukkan peran sesuai yang di harapkan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Azis Prasetyo, 2016, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang diakibatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan program BUMDes masih terbatas. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes salah satunya adalah pemberdaayaan bidang pendidikan

Menurut hasil penelitian [4] menyatakan bahwa masih ada BUMDes yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan belum mampu melayani dengan maksimal. Alasannya adalah masih ditemukan aparat desa yang kurang aktif sehingga belum mampu memberika pelayanan yang terbaik. Selain itu juga BUMDes masih ada belum menyediakan PAUD disetiap dusun dan mengakibatkan anak usia dini yang jauh dari PAUD kesulitan untuk mendapat fasilitas pendidikan usian dini

[5] menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes, diharapkan mampu menciptakan demokrasi sosial melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Kenyataan dilapangan masih ditemukan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan anak usia dini. Dalam hasil penelitian [6] menyebutkan data hasil rekapan badan statistic Kabupaten Kampar bahwa dari 100 anak usia dini, yang masuk ke PAUD hanya 17 orang (17% dari 100 siswa). Sebagian besar siswa masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan di PAUD. Khusus di desa Tanah Tinggi bahwa angka partisipasi anak masih sangat rendah dalam mendapatkan pendidikan di PAUD. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana peran BUMDes secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dasar dan secara khusus yang ada di kecamatan Palibelo Kabupaten Bima 2) Bidang usaha lain apa saja yang dijalankan BUMDes yang ada di kecamatan Palibelo?

BUMDes adalah usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berbadan hukum dan dibentuk serta dikelola oleh masyarakat desa secara produktif dengan tujuan untuk pembedayaan perekonomian masyarakat [7]. Definisi ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Sayutri (2011) bahwa BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa, dimana masyarakat dan pemerintah desa sebagai pengelola dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat serta membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibangun sesuai kebutuhan dan potensi desa. Menurut Hardoyo dkk (2014) bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dasar hukum dari pendirian BUMDes adalah UU No 32 Tahun 2004 Pasal 203 yang berbunyi bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan potensi desa masing-masing, BUMDes harus mengacu terhadap peraturan perundang undangan, BUMDes bisa melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemendesa No 4 Tahun 2015 menjadi penjelas landasan hukum mengenai keberadaan BUMDes dan tata kelola BUMDes. Pemendesa No 4 Tahun 2015 ini berisi tentang bagaimana proses berdirinya BUMDes, jenis usaha yang boleh dilakukan, modal BUMDes, siapa yang berhak dalam mengelola BUMDes, pelaporan dan pertanggungjawaban dari BUMDes. UU No 6 Tahun 2014 yang berisi bahwa desa dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu badan usaha yang digunakan untuk mengelola asset, pelayanan dan usaha lainnya sebagai kesejahteraan masyarakat yang modalnya berasal dari kekayaan desa itu sendiri. Pasal 87 ayat (1) yaitu tentang pendirian (BUMDes) pada desa, ayat (2) BUMDes dikelola dengan kegotongroyongan dan kekeluargaan, ayat (3) usaha BUMDes bisa dibidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pasal 88 yaitu mengenai tentang pendirian BUMDes, pasal 89 yaitu manfaat dari hasil BUMDes itu sendiri seperti untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, pengembangan usaha dll. Pasal 90 berisi tentang arah pengembangan BUMDes bagi masyarakat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada tanpa mengubah keadaan yang terjadi. Data yang dikumpulkan secara langsung melalui instrumen wawancara tertutup dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan melalui googleform. Sedangkan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat dokumen atau berbagai hasil penelitian terdahulu. Informan yang dijadikan sumber data adalah seluruh kepala desa yang ada dikecamatan Palibelo yang terdiri dari 13 desa dan 1 orang dari dinas DPMDes. Analisis kualitatif dengan merujuk model yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Dimana kegiatan menganalisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktivitas yang dilakukan mulai dari: 1) data reduction, 2) data display dan 3) *conclusion drawing verivikacation*. Analisis data dilakukan secara deksriptif

dengan melihat persentase berapa banyak desa yang sudah memiliki program dalam bidang pendidikan dasar serta analisis secara kualitatif berkaitan dengan perannya dalam kesejahteraan masyarakat desa khusus dalam bidang pendidikan dasar. Berikut rumus persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jenis Usaha}}{\text{Total Usaha}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terkumpul, diperoleh informasi mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes yang ada di kecamatan Palibelo. Berikut data jenis usaha tersebut yang dimuat dalam tabel 1.

Tabel 1. Jenis Usaha

No	BUMDes/Desa	Usaha Bidang Pendidikan	Usaha Di Bidang Lain	Nama Usaha
1	Palibelo	-	Ada	Pakan dan Obat-Obat Pertanian
2	Bre	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
3	Tonggondoa	-	Ada	Usahanya depot air minum
4	Tonggorisa	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
5	Ragi	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
6	Teke	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
7	Ntonggu	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
8	Nata	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
9	Dore	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
10	Panda	-	Ada	Usaha Uma lengge. Coffe shop modern
11	Roka	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
12	Roi	-	Ada	Simpan Pinjam Uang
13	Padolo	-	Ada	Simpan Pinjam Uang

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dikecamatan Palibelo yang terdiri dari 13 Desa sudah memiliki BUMDes. Dari keseluruhan BUMDes yang ada memiliki usaha yang berbeda. Jika dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, dapat dikategorikan dalam bidang Usaha bisnis keuangan yakni adanya Koperasi sebagai wadah simpan pinjam, yang kedua Usaha di bidang perdagangan, usaha penyewaan, usaha bidang sosial yakni usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan dan bernuansa bisnis. Usaha dalam bidang ini yang dilakukan adalah usaha depot air minum. Untuk usaha bidang pendidikan, dari keseluruhan BUMDes belum ada yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan baik itu pendidikan usian dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah atas. Secara umum bahwa BUMDes yang ada dikecamatan Palibelo belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris DPMDes Kabupaten Bima diperoleh informasi bahwa usaha yang dijalankan BUMDes belum ada yang bergerak dibidang pendidikan. Usaha yang dijalankan lebih kepada usaha dibidang perdagangan, pertanian, dan usaha dibidang bisnis keuangan. Dari tabel 1 diatas dapat dibuat persentase dari setiap jenis usaha yang dijalankan BUMDes. Adapun tabelnya sebagai berikut

Tabel 2. Persentase jenis usaha

No	Jenis usaha	Persentase
1	Usaha bisnis keuangan (Koperasi sebagai wadah simpan pinjam)	77%
2	Usaha di bidang perdagangan	15%
3	Pertanian dan peternakan	8%
4	Bidang Pendidikan	0%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes yang ada dikecamatan Palibelo belum semuanya bergerak diberbagai bidang usaha. Satu desa hanya menjalankan satu atau dua usaha saja. Bahkan ada desa yang sama sekali belum maksimal dalam menjalankan usahanya walaupun hanya satu bidang usaha. Usaha yang dijalankan kebanyakan usaha dibidang bisnis keuangan (koperasi) dengan persentase 77%, lalu yang ke dua dengan persentase sebesar 15% dibidang usaha perdagangan. Yang ke tiga adalah bidang pertanian dan peternakan dengan persentase 8%. Untuk usaha dalam bidang pendidikan dengan persentase 0%. Darai tabel di atas juga dapat diketahui bahwa peran BUMDes dalam bidang pendidikan 0% atau dalam artian bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.

Menurut [8] menyatakan bahwa kebanyakan BUMDes belum banyak yang berkembang dengan maksimal, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh pengelolaan yang belum professional. Menurut [9] bahwa SDM yang kurang maksimal sehingga BUMDes tidak bisa jalan dnegan baik. Menurut [10], [11] dan [12] bahwa kebanyakan BUMDes belum berjala tidak maksimal. Menurut [13] bahwa banyak BUMDes yang sudah dibentuk akan tetapi tidak memiliki kegiatan yang dijalankan. [14] dalam hasil penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes belut maksimal

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa Belum adanya peran BUMDes dalam bidang pendidikan. Hal ini terjadi diakibatkan karena banyak factor. Salah satunya adalah factor SDM. Hal ini sejalan dengan pendapat [15] menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, merupaka factor yang berpengaruh dalam keberhasilan program kerja BUMDes. Menurut [16] BUMDes yang belum berhasil diakibatkan oleh usaha yang dijalankan tidak dianalisis dengan baik dan belum mampu merancang usaha dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa bahwa BUMDes belum memikirkan dan menganalisis usaha apa yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan maasyarakat di bidang pendidikan dasar. Sementara ini BUMDes hanya menjalankan usaha dibidang simpan pinjam (koperasi). Menurut [17] bahwa BUMDes pada umumnya kebanyakan menjalankan usaha berupa simpan pinjam, namun ada juga yang mengelola dalam bentuk usaha kecil menengah (UKM) atau desa wisata. [18] menyatakaan bahwa Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. Unit usaha simpan pinjam diasumsikan sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Untuk usaha yang dikelola pada bidang pertanian dan peternakan yang ada dikecamatan Palibelo. Memang usaha ini sesuai dengan potensi daerah. Dimana daerah-daerah yang ada di kecamatan palibelo didominasi dengan daerah dengan kegiatan pencaharian masayarakn dibidang pertanian dan perkebunan

Pembentukan usaha dari setiap desa oleh BUMDes yang ada dikecamatan Palibelo masih sangat minim dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. [19] menyatakan bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan usaha sesuai potensi daerah. Menuurt [20] dan [21] menyatakan bahwa BUMDes harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal desa dalam mendukung perkembangan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Usaha yang dijalankan kebanyakan usaha dibidang bisnis keuangan (koperasi) dengan persentase 77%, lalu yang ke dua dengan persentase sebesar 15% dibidang usaha perdagangan. Yang ke tiga adalah bidang pertanian dan peternakan dengan persentase 8%. Untuk usaha dalam bidang pendidikan dengan persentase 0%. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, lebih khusus kepada dosen pengampu mata kuliah THK dan ucapan terimakasih disampaikan kepada STKIP Taman Siswa Bima yang telah mendukung kegiatan penelitian ini

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Ridlwan and F. H. Unila, "Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan perekonomian desa," *J. Ilmu Huk.*, pp. 424–440, 2014.
- [2] I. Meutia, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *J. Akunt. Multiparadigma JAMAL*, vol. 8, no. 2, pp. 227–429, 2017.
- [3] A. J. N. Chairul Saleh, Markus Apriono, Adi Prasodjo, "Perspektif Pengembangan Pariwisata Rawa Indahdi Desa Wisata ' Alas Sumur ' Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso," *Semin. Nas. Manaj. dan Bisnis ke-3 Progr. Stud. Manaj. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Jember*, pp. 492–502, 2016.
- [4] A. Yusran, A. R. Pananrangi, and S. Bahri, "The Implementation of Village Funds for Community Development and Empowerment in Bolli Village," vol. 2, no. 2, pp. 54–61, 2020.
- [5] S. H. Posi and S. P. A. M. Putra, "Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi Dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Terhadap pelaporan keuangan BUMDes Berdasarkan sak etap," pp. 463–469, 2021.
- [6] R. Ananda, "Program Pengembangan Desa Mitra untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Anak Usia Dini pada Lembaga PAUD," *J. Abdidas Vol. INomor 1 Tahun 2020 Hal. 12-15 J. ABDIDAS Community Dev. Serv. Educ. Heal. Sci.*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [7] N. Wayan, S. Pebriyanti, P. S. Kurniawan, and E. Sujana, "Analisis Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes di Kabupaten Klungkung) e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha," vol. 1, no. 1, 2017.
- [8] C. Suparno, "Model analisis kelayakan usaha bumdes di kecamatan kaligondang," vol. 5, no. November, pp. 960–964, 2017.
- [9] N. Putu *et al.*, "Pengembangan Usaha Bumdes Desa Tunjung Dan Depeha," *Maj. Apl. Ipteks NGAYAH*, vol. 7, no. 1, 2016.
- [10] M. B. Pratiwi, I. Novianty, and K. Kunci, "Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat," pp. 26–27, 2020.
- [11] K. Amri, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa," *J. Ilmu Adm. Negara, Vol.*, vol. 13, no. 3, pp. 295–299, 2015.
- [12] C. B. Ramadana and H. Ribawanto, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)," *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 6, pp. 1068–1076, 2010.
- [13] S. Veronica and B. K. Vuspitasari, "Analisa Pemilihan Pengurus Dan Unit Usaha Bumdes," pp. 159–168, 2020.
- [14] R. A. Prasetyo, "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan," *J. Dialekt.*, vol. 11, no. May, 2017.

- [15] Jaka Sulaksana and I. Nuryanti, “Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka,” vol. 3, pp. 348–359, 2019.
- [16] I. K. Bhisma and P. Wasuka, “Penyusunan Analisis Kelayakan Unit Usaha Bumdes Di Desa Antiga Kelod,” *Proceeding Senadimas Undiksha 2021 / 54*, pp. 54–64, 2021.
- [17] K. Jombang and E. Pancaningrum, “Pendampingan Usaha BUMDes Maju Jaya ‘ BMJ ’ Desa Sawiji ,” *Comvice*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [18] E. W. Kushartono, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *J. Din. Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, 2016.
- [19] L. Handajani, Z. Abidin, and E. Pituringsih, “Establishment Of Bumdes Business Development For Community Economic Empowerment In Peteluan Indah Village,” *J. ABDI Insa. Univ. MATARAM*, vol. 8, no. April, pp. 10–17, 2021.
- [20] H. Karamoy and V. Tirayoh, “Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMDes Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” *J. VIVABIO*, vol. 2, pp. 25–30, 2020.
- [21] U. Hidayah and S. Mulatsih, “Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya,” *J. Benefita*, vol. 5, no. 1, pp. 101–112, 2020.